



LAPORAN KINERJA

KECAMATAN MANGUHARJO

TAHUN 2021



LAPORAN KINERJA

KECAMATAN MANGUHARJO

TAHUN 2021

KECAMATAN MANGUHARJO

KOTA MADIUN

TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr Wb

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Pelaporan Kinerja Tahun 2021 Kecamatan Manguharjo Kota Madiun telah dapat diselesaikan penyusunannya. Yang merupakan salah satu upaya menuju penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP) yang lebih baik. Pelaporan Kinerja tahun 2021 yang kami susun ini merupakan pelaporan kinerja di tahun pertama pada Renstra Kecamatan Manguharjo Kota Madiun 2014-2019.

Disamping sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan amanah yang diterima, Pelaporan Kinerja tahun 2021 ini merupakan kebutuhan sebagai bahan evaluasi kinerja yang telah dilaksanakan, guna penyempurnaan perencanaan kinerja selanjutnya. Dan tentunya merupakan pemenuhan kewajiban, sebagaimana diamanatkan dalam Perpes RI Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Permenpan RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja.

Penyusunan Pelaporan Kinerja Tahun 2021 dapat terlaksana berkat dukungan dan kerjasama seluruh aparat di lingkungan Kecamatan Manguharjo Kota Madiun, Tim Penyusun Pelaporan Kinerja, dan pihak-pihak lainnya terkait, mengucapkan terima kasih atas segala dukungan dan bantuannya.

Menyadari sepenuhnya bahwa Pelaporan Kinerja ini masih jauh dari sempurna, namun kami terus berupaya untuk meningkatkannya baik dalam penyajian maupun substansi penyusunan Pelaporan Kinerja di tahun-tahun mendatang.

Selanjutnya semoga Pelaporan Kinerja Kecamatan Manguharjo Kota Madiun tahun 2021, bermanfaat khususnya bagi Kecamatan Manguharjo dalam upaya untuk melakukan peningkatan kinerja .

Wassalamu'alaikum Wr Wb

Madiun, Januari 2022

CAMAT MANGUHARJO


DANANG NOVIANTO
Pembina

NIP. 19830507 200112 1 002

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Bab I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	1
1.3 Tujuan Penyusunan	3
1.4 Gambaran Umum	3
Bab II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	11
A. Rencana StrategiS	11
1 Tujuan Kecamatan	12
2 Sasaran dan Indikator	13
B. Rencana Kinerja	13
1. Sasaran dan indicator sasaran	14
2. Program	17
3. Kegiatan	18
4. Sub Kegiatan	19
Bab III. AKUNTABILITAS KINERJA	23
A. Capaian Kinerja Organisasi	15
1. Metode Pengukuran Capaian Kinerja	16
2. Metode Penyimpulan Capaian Sasaran	16
3. Hasil Pengukuran dan Analisis Capaian Kinerja	17
Sasaran 1	17
Sasaran 2	19
Sasaran 3	23
B Realisasi Anggaran	29
Bab IV. PENUTUP	48
Lampiran-Lampiran	iii
Lampiran 1. Pengukuran Kinerja Tahun 2021	
Lampiran 2. Matrik Renstra Perubahan	
Lampiran 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2021	
Lampiran 4. Foto Kegiatan Tahun 2021	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah atas penggunaan anggaran dalam rangka untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dicapai dan sebagai upaya instansi pemerintah untuk mengadakan perbaikan yang berkesinambungan untuk meningkatkan kinerjanya.

Sebagai konsistensi terhadap komitmen dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, Kecamatan Manguharjo Kota Madiun dalam penyusunan Laporan Kinerja tahun 2021 disusun berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja, sebagai wujud pertanggungjawaban Kecamatan Manguharjo Kota Madiun dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, serta untuk untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dengan berpedoman pada Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Manguharjo Tahun 2019 – 2024.

B. Dasar Hukum

Dasar Hukum penyusunan laporan kinerja kecamatan antara lain sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomer 53 Tahun 2014 Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Madiun Tahun 2019-2024
10. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomer 4 Th 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomer 17 th 2019 tentang RPJMD 2019-2024;
12. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 08 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Perda Daerah Kota Madiun Nomor 11 Th 2020 Tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021
14. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

15. Peraturan Walikota Madiun Nomor 82 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan;
16. Peraturan Walikota Nomor 57 Tahun 2020 Tentang Pejabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021
17. Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2021 Tentang Pejabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021;
18. Peraturan Walikota Madiun Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kota Madiun Tahun 2019-2024;
19. Peraturan Walikota Madiun Nomer 04 2021 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun;

C. Tujuan Penyusunan

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Manguharjo dimaksudkan sebagai perwujudan kewajiban Kecamatan Manguharjo untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Tahun 2021, serta sebagai umpan balik untuk memacu perbaikan kinerja pada Kecamatan Manguharjo pada tahun mendatang.

Sedangkan tujuan penyusunannya adalah sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dicapai.
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.
3. Sebagai bahan umpan balik untuk perencanaan kinerja di masa datang.
4. Sebagai media dalam upaya menyelenggarakan *clean government* menuju *good governance*, dan untuk memenuhi tiga pilar utama yaitu akuntabilitas, tranparansi, dan partisipasi melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

D. GAMBARAN UMUM OPD

1. Susunan Organisasi

Sebagaimana ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka Peraturan Walikota Madiun Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Madiun Nomor 44 Tahun 2018 dan Peraturan Walikota Madiun Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kelurahan dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini sehingga perlu Peraturan Walikota Madiun Nomor 82 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan.

A. Adapun kedudukan kecamatan sebagai berikut :

- (1) Kecamatan merupakan perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat.
- (2) Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat atau sebutan lain dan kelurahan.

B. Kedudukan Kelurahan :

- (1) Kelurahan sebagai Perangkat Kecamatan yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kelurahan yang dipimpin oleh Lurah.
- (2) Selain melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah dibantu oleh Perangkat Kelurahan untuk melaksanakan tugas yang diberikan oleh Camat

Untuk Rincian tugas Camat mempunyai sebagai berikut :

- a. menyelenggarakan urusan Pemerintahan Umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

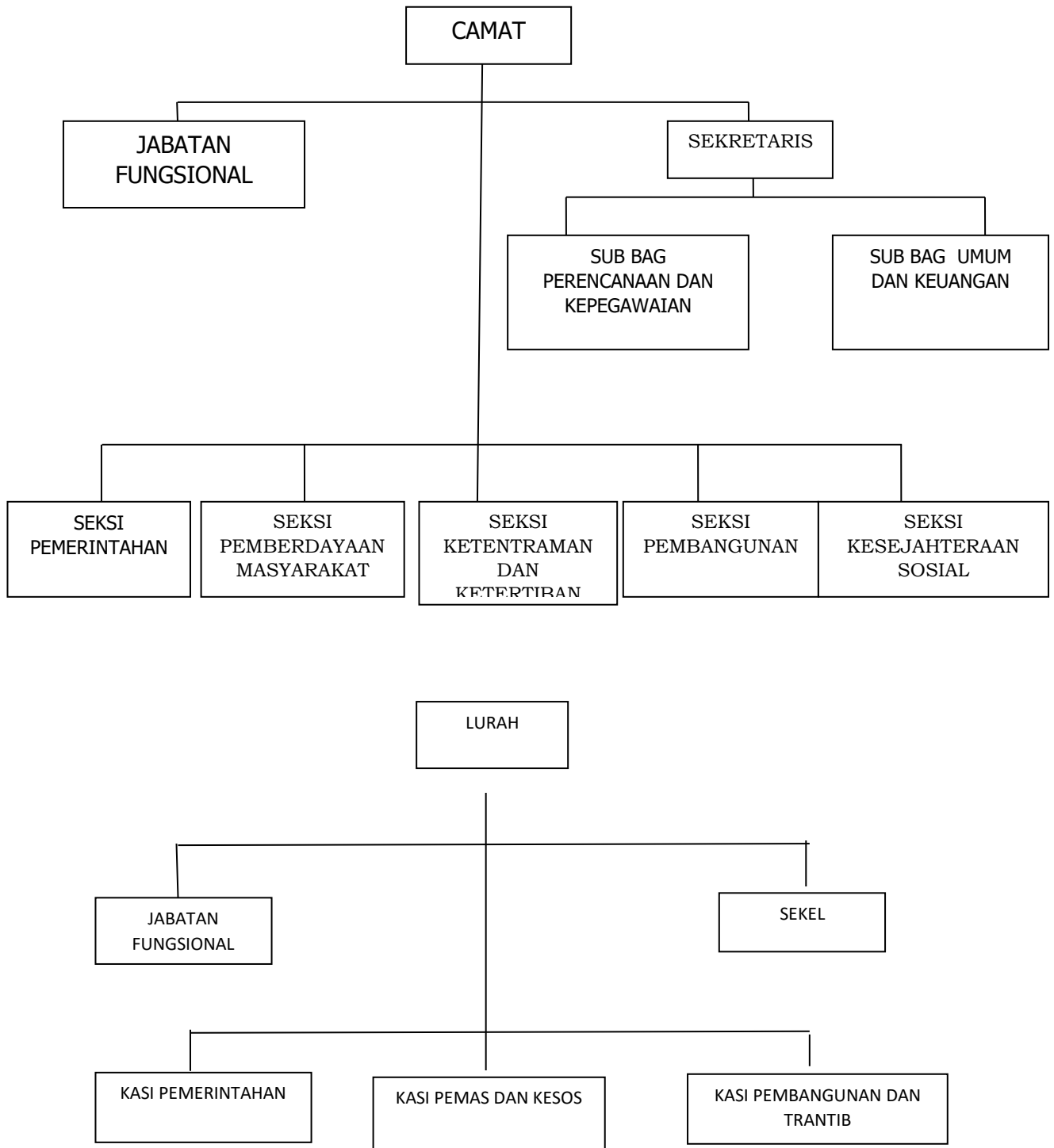
- b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat baik di tingkat Kecamatan maupun di Kelurahan meliputi:
1. partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan;
 2. sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
 3. efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan; dan 4. pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi:
1. sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;
 2. harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan
 3. pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota, meliputi:
1. sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 2. pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, meliputi:
1. sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait;
 2. pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta; dan

3. pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan, meliputi:
 1. sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait; dan
 2. efektivitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan; dan
 3. pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
 - g. melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengawasan, evaluasi kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana di Kecamatan dan Kelurahan;
 - h. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
 - i. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan;
 - j. melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Walikota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
 - k. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan; dan
 - l. melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Walikota.
- Adapun Susunan Organisasi Kecamatan Manguharjo adalah sebagai berikut :
 - (1) Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari :
 - a. Unsur Pimpinan : Camat ;
 - b. Unsur Pembantu : Sekretariat ;
 - c. Unsur Pelaksana :
 1. Seksi Pemerintahan ;
 2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat ;

3. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum ;
 4. Seksi Pembangunan ; dan
 5. Seksi Kesejahteraan Sosial.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
 - (3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
 - (4) Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
 - (5) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk oleh Camat.
 - (6) Bagan Susunan Organisasi Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.
- (1) Susunan Organisasi Kelurahan terdiri atas:
 - a. Unsur Pimpinan : Lurah;
 - b. Unsur Pembantu : Sekretariat;
 - c. Unsur Pelaksana :
 1. Seksi Pemerintahan;
 2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial;
dan
 3. Seksi Pembangunan, Ketentraman dan Ketertiban Umum.
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - (2) Kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
 - (3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah.
 - (4) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah.
 - (5) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk oleh Lurah.

(6) Bagan Susunan Organisasi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

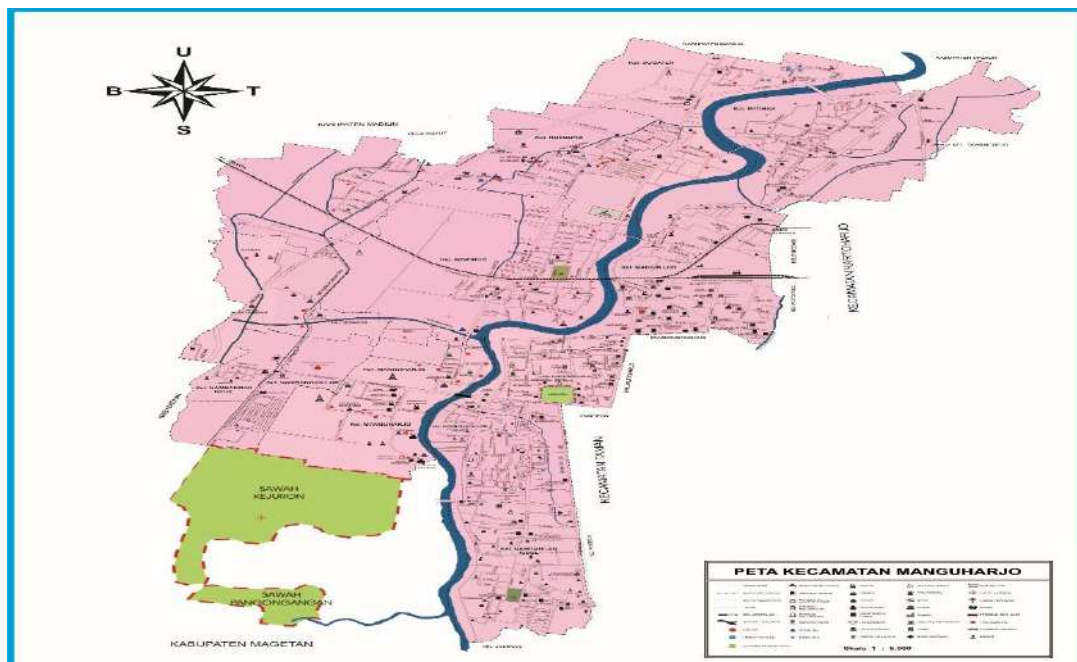
STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN MANGUHARJO DAN KELURAHAN



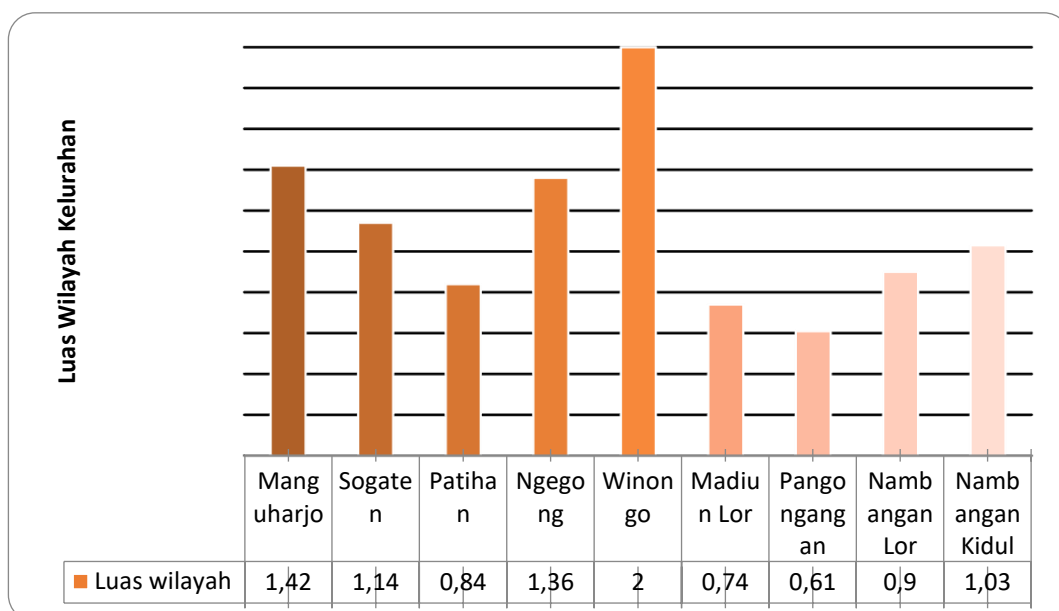
2. Kondisi Wilayah

Secara geografis Kecamatan Manguharjo terletak dibagian barat Kota Madiun yang merupakan salah satu dari tiga Kecamatan yang ada di wilayah Kota Madiun dengan luas wilayah 10,04 Km². Adapun Batas wilayahnya dapat dilihat pada Peta wilayah Kecamatan Manguharjo berikut ini :

PETA KECAMATAN MANGUHARJO

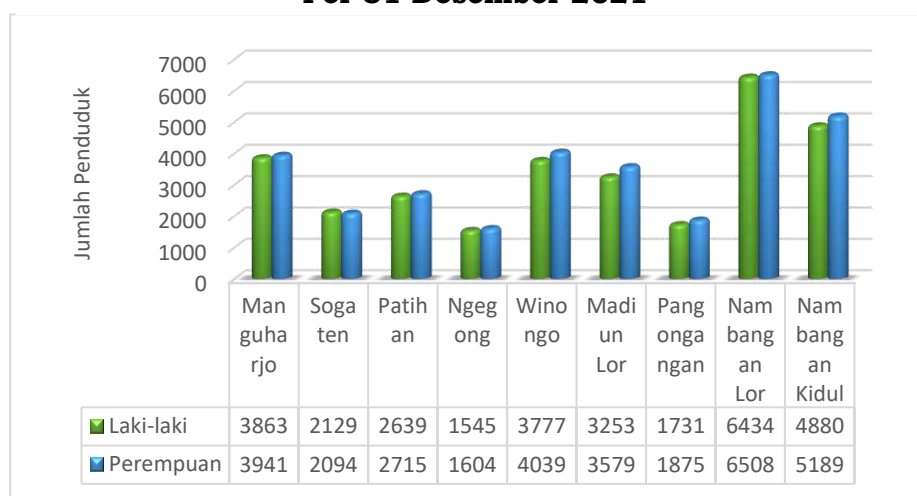


Secara administratif Kecamatan Manguharjo terdiri dari 9 (sembilan) Kelurahan dengan luas wilayah masing-masing kelurahan dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut.



Adapun jumlah penduduk di 9 kelurahan se Kecamatan Manguharjo pada akhir tahun 2021 mencapai 61.795 Jiwa yaitu jumlah penduduk laki-laki sebanyak 30.251 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 31.544 jiwa. Adapun rincian jumlah penduduk di 9 kelurahan dapat dilihat pada grafik 1.2

Grafik 1.2
Jumlah Penduduk Kecamatan Manguharjo
Per 31 Desember 2021

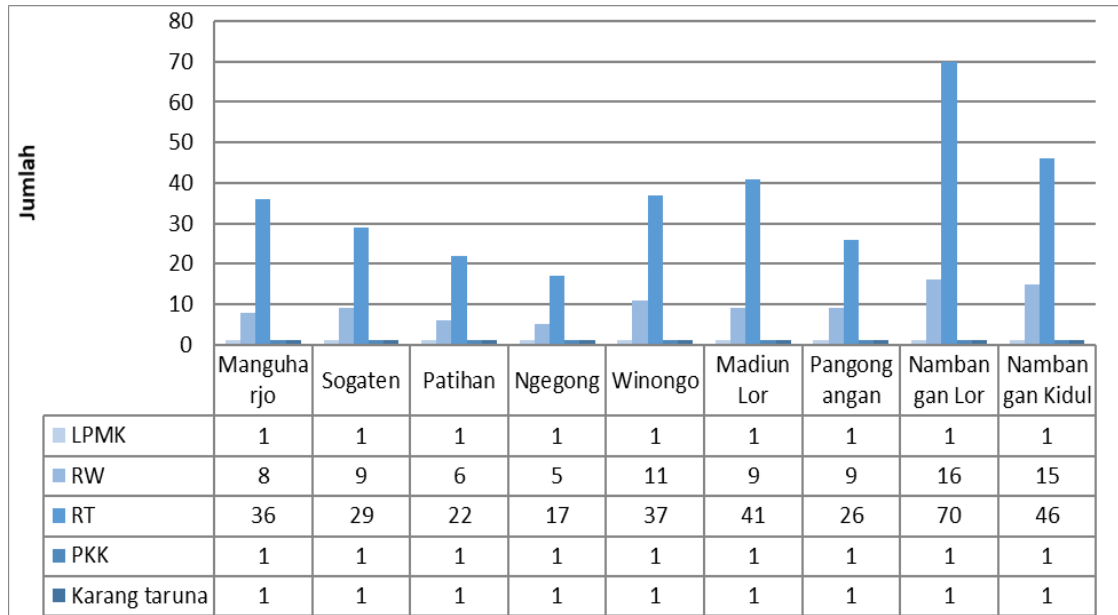


Sedangkan lembaga kemasyarakatan yang ada yang di 9 kelurahan yang mana menjadi penyambung informasi antara masyarakat dengan

pemerintah terdiri 324 RT, 88 RW, 9 LPMK, 9 PKK dan 9 Karang taruna
Adapun rincian jumlah RT, RW, LPMK, PKK dan karang taruna di 9
Kelurahan dapat dilihat pada grafik 1.3 berikut.

Grafik 1.3

Jumlah Lembaga kemasyarakatan Kecamatan Manguharjo



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Dalam rangka untuk mencapai tujuan dan sasaran Kecamatan Manguharjo Kota Madiun telah ditetapkan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya organisasi yang meliputi penetapan langkah-langkah kegiatan dengan memperhatikan sumber daya organisasi serta keadaan lingkungan yang dihadapi guna memberikan kesatuan pandang dalam pelaksanaannya.

Dalam pelaksanaan tugasnya agar lebih terarah, berhasil dan berdaya guna, maka ditetapkan tujuan dan strategi Kecamatan Manguharjo Kota Madiun dalam rangka mewujudkan tujuan kota yang telah ditetapkan.

A. TUJUAN, SASARAN SERTA INDIKATOR KINERJA DAN TARGET TAHUNAN RENSTRA KECAMATAN MANGUHARJO.

1. TUJUAN KECAMATAN MANGUHARJO

Tujuan merupakan pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi dan melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan kedalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Tujuan jangka menengah Kecamatan Manguharjo Kota Madiun Tahun 2019–2024 beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 2.1 sebagaimana berikut ini.

Tabel 2.1

Tujuan, Indikator Tujuan dan Target Tujuan Kecamatan Manguharjo

No	Tujuan	Indikator	Rumus	Kondisi Awal 2019/2020	Target Tahun 2021
1.	Terwujudnya pemerintahan kecamatan yang baik	Indek Kepuasan Masyarakat	$\frac{\text{Total nilai persepsi per unsur} \times \text{nilai penimbang}}$	90,10%	90,54%

2. SASARAN KECAMATAN MANGUHARJO

Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi SKPD atau kelompok sasaran yang dilayani serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja.

B. RENCANA KINERJA

Rencana Strategis Kecamatan Manguharjo Tahun 2019-2024 dijabarkan secara bertahap dalam Rencana kinerja Tahunan yang memuat target kinerja tahunan dari masing-masing indikator kinerja sasaran. Target yang telah disepakati bersama dengan kerangka pendanaan masing-masing program dan kegiatan yang mendukungnya, selanjutnya ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja dengan anggaran belanja tahun 2021 sebesar Rp. 24.129.112.605 ,-(*dua puluh empat milyar seratus dua puluh Sembilan juta seratus dua belas ribu enam ratus lima rupiah*). Besaran target kinerja yang ditetapkan untuk dicapai dalam tahun 2021 sebagaimana ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Perubahan sesuai penetapan Perubahan RPJMD, Kecamatan Manguharjo 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2**Perjanjian Kinerja Kecamatan Manguharjo Tahun 2021**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Manguharjo	Nilai hasil Evaluasi Implementasi Sakip	80,01(skor)
2	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Kecamatan dan Pembinaan Pemerintahan Kelurahan	Prosentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan sosial, pembangunan dan ketentraman dan ketertiban masyarakat	100%
3	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dan Pemangku Kepentingan Kecamatan Manguharjo	Prosentase Kelurahan Yang Mendapatkan Klasifikasi Swasembada di Kecamatan Manguharjo	22%

1. SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN

Dengan ditetapkanya Perubahan RPJMD Kota Madiun sesuai Perda Nomer 04 tanggal 01 Desember Tahun 2021, maka sasaran Kinerja Kecamatan Manguharjo mengalami perubahan yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja kecamatan Manguharjo mulai tahun 2022-2024.

Untuk merealisasikan pelaksanaan Kinerja Kecamatan Manguharjo tahun 2021, perlu ditetapkan tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan serta penetapan sasaran dan perubahanya yang merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang telah ditetapkan.

Adapun sasaran jangka menengah Kecamatan Manguharjo Kota Madiun Tahun 2019–2024 beserta indikator kinerjanya dengan

penambahan sasaran di tahun 2021 disajikan dalam Tabel 2.3 sebagaimana berikut ini.

Tabel 2.3
Sasaran, Indikator Sasaran Kecamatan Manguharjo

Uraian	Indikator	Rumus
1	2	3
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Manguharjo	Nilai hasil Evaluasi Implementasi Sakip	$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Taerget}} \times 100\%$
Meningkatnya tata kelola pemerintahan kecamatan dan pembinaan pemerintahan kelurahan	Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	$\frac{\text{Jumlah rekomendasi yg terselesaikan}}{\text{Jumlah permohonan rekomendasi}} \times 100\%$
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dan Pemangku Kepentingan Kecamatan Manguharjo	Prosentase Kelurahan Yang Mendapatkan Klasifikasi Swasembada di Kecamatan Manguharjo	$\frac{\text{Jumlah kelurahan yang mendapatkan klasifikasi swasembada}}{\text{Jumlah Kelurahan se- Kecamatan Manguharjo}} \times 100\%$

Tabel 2.4
Target Tahunan Renstra Kecamatan Manguharjo

Sasaran	Indikator Kinerja	2019	2020	2021	2022	2023	2024
2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya tata kelola pemerintah kecamatan dan pembinaan pemerintahan kelurahan	Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	100%	100%				
Meningkatnya partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan kecamatan manguharjo	Prosentase usulan musrenbang kecamatan yang terakomodir dalam RKPD	100%	100%				
Perubahan Sasaran Tahun 2021							
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Manguharjo	Nilai hasil Evaluasi Implementasi Sakip			80,01	80,01	80,01	80,01
Meningkatnya tata kelola pemerintahan kecamatan dan pembinaan pemerintahan kelurahan	Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan			100%	100%	100%	100%

Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dan Pemangku Kepentingan Kecamatan Manguharjo	Prosentase Kelurahan Yang Mendapatkan Klasifikasi Swasembada di Kecamatan Manguharjo			33%	44%	55%	66%
---	--	--	--	-----	-----	-----	-----

Kecamatan Manguharjo telah menetapkan target tahunan dalam Rencana strateginya tahun 2019-2024. Dalam proses Perubahan Renstra sesuai Penetapan RPJMD maka terdapat perubahan pada target tahunannya mulai tahun 2021 di kecamatan Manguharjo. Pengukur pencapaian kinerja pada target tahunan Kecamatan Manguharjo periode tahun 2019-2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.4
Target Tahunan Renstra Kecamatan Manguharjo

2. Program

No.	Program	Pagu Anggaran	Realisasi Serapan	%
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	11.379.379.567	10.244.016.547	90,02
II	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	7.396.857.097	6.851.120.812	92,62
III	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	4.743.071.967	4.615.283.444	97,31
IV	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	427.877.480	380.470.930	88,92
V	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	181.926.494	167.512.757	92,08

3. Kegiatan

No.	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Serapan	%
1.	Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	59.784.000	56.199.319	94,00
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.854.964.210	8.944.066.043	90,76
3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	7.200.000	7.136.850	99,12
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	82.596.000	77.544.965	93,88
5.	Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.163.622.240	1.011.012.366	86,88
6.	Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	211.213.117	148.057.004	70,10
7.	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	7.334.651.657	6.793.453.493	92,62
8.	Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	62.205.440	57.667.319	92,70
9.	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	4.743.071.967	4.615.283.444	97,31
10.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	109.875.290	103.764.308	94,44
11.	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada	318.002.190	276.706.622	87,01
12.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala daerah	181.926.494	167.512.757	92,08

4. Sub Kegiatan

No.	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Serapan	%
1.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	59.784.000	56.199.319	94,00
2.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.852.964.210	8.942.154.343	90,76
3.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2.000.000	1.911.700	95,59
4.	Sosialisasi Peraturan perundang-undangan	7.200.000	7.136.850	99,12
5.	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	82.596.000	77.544.965	93,88
6.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.163.622.240	1.011.012.366	86,88
7.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	54.153.950	28.808.029	53,20
8.	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	111.759.167	82.780.675	74,07
9.	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	45.300.000	36.468.300	80,50
10.	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kelurahan Madiun Lor	806.877.144	767.614.043	95,13
11.	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kelurahan Manguharjo	833.000.000	800.027.150	96,04

12.	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kelurahan Nambangan Kidul	818.639.538	789.409.024	96,43
13.	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kelurahan Nambangan Lor	1.132.411.350	1.088.621.572	96,13
14.	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kelurahan Ngegong	701.615.180	639.060.126	91,08
15.	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kelurahan Pangongangan	765.308.030	683.971.420	89,37
16.	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kelurahan Patihan	691.568.850	639.415.864	92,46
17.	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kelurahan Sogaten	769.628.790	665.698.551	86,50
18.	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kelurahan Winongo	815.602.775	719.635.743	88,23
19.	Koordinasi /Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	62.205.440	57.667.319	92,70
20.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	318.891.760	237.958.529	74,62
21.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Madiun Lor	467.000.000	459.396.476	98,37
22.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Manguharjo	650.000.000	644.593.200	99,17

23.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Nambangan Kidul	225.000.000	225.000.000	100,00
24.	Pembangunan Sarana dan Prasarana kelurahan Nambangan Lor	900.000.000	890.247.189	98,92
25.	Pembangunan Sarana dan Prasarana kelurahan Ngegong	371.800.000	366.505.000	98,58
26.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pangongangan	370.000.000	369.797.835	99,95
27.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Patihan	420.000.000	414.937.000	98,79
28.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sogaten	594.680.207	593.450.100	99,79
29.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Winongo	425.700.000	413.398.115	97,11
30.	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	109.875.290	103.764.308	94,44
31.	Koordinasi/ Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	318.002.190	276.706.622	87,01
32.	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	111.926.494	98.775.757	88,25

33.	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	55.000.000	54.255.500	98,65
34.	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintah yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	15.000.000	14.481.500	96,54

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan suatu kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan tujuan organisasi kepada pemberi amanah maupun pihak-pihak lain yang berwenang menerima pelaporan.

Selaku pengemban amanah masyarakat, Kecamatan Manguharjo melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyusunan dan penyajian Pelaporan Kinerja Kecamatan Manguharjo. Pelaporan Kinerja tersebut disusun sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja

Pelaporan Kinerja Kecamatan Manguharjo Tahun 2021 disusun dalam rangka mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Kecamatan Tahun 2021 yang penyusunannya telah mengacu pada Rencana Strategis Kecamatan Tahun 2019-2024. Dengan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Manguharjo Kota Madiun Tahun 2021 memuat perubahan Program dan Kegiatan serta sub kegiatan sesuai Permendagri No. 90 tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan Daerah yang dibiayai oleh APBD Kota Madiun

A. CAPAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indicator kinerja sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan

perhitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (performance gap). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja dimasa yang akan datang (performance improvement).

Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran capaian kinerja adalah Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Manguharjo tahun 2021. Selain untuk pengukuran kinerja capaian tahun 2021 indikator kinerja utama juga telah digunakan dalam penyusunan perencanaan dan penetapan kinerja tahun 2021.

Metode pengukuran dan penyimpulan yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Metode pengukuran capaian kinerja

Pengukuran pencapaian kinerja masing-masing sasaran pada Kecamatan Manguharjo dilakukan dengan cara :

- 1) Membandingkan antara target kinerja dengan realisasi pada tahun 2021
- 2) Membandingkan antara realisasi kinerja tahun 2021 dengan tahun sebelumnya (tidak bisa dibandingkan karena terdapat perubahan sasaran dan indikator sasaran antara tahun 2020 dan 2021 pada Perubahan RPJMD dan Perubahan Renstra .
- 3) Membandingkan realisasi kinerja tahun 2021 dengan target jangka menengah yang ada di dokumen Renstra (dibandingkan dengan target akhir Renstra tahun 2024 capaian kinerja sudah mencapai target)
- 4) Evaluasi dan analisis capaian kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut :

- a. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

2. Metode Penyimpulan Capaian Sasaran

Hasil pengukuran capaian kinerja disimpulkan baik untuk masing-masing indikator kinerjanya maupun untuk capaian pada tingkat sasaran. Penyimpulan dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut ;

Tabel 3.1

Metode Penyimpulan Capaian Sasaran

No	Kreteria Pengukuran	Predikat
1	$X \geq 100\%$	Sangat Baik
2	$85\% \leq X < 100\%$	Baik
3	$60\% \leq X < 85\%$	Cukup Baik
4	$X < 60\%$	Kurang Baik

Evaluasi dan Analisis Kinerja

Pencapaian Kinerja belanja SKPD merupakan perbandingan antara indikator target kinerja yang ditetapkan dengan realisasinya, seberapa besar SKPD mampu merealisasikan program dan Kegiatannya terkait dengan program dan kegiatan yang ditetapkan dalam rencana kerja tahunan SKPD dalam rangka untuk mencapai target kinerja sasaran yang telah ditetapkan.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Manguharjo terdiri dari program dan kegiatan strategi maupun program kegiatan penunjang. Program strategis adalah program yang dilaksanakan untuk mencapai target sasaran, sehingga diharapkan secara langsung akan

dapat berpengaruh terhadap pencapaian target sasaran strategis. Sedangkan program penunjang adalah program yang dilaksanakan untuk menyelenggarakan administrasi perkantoran, sebagai upaya untuk kelancaran pencapaian target sasaran.

➤ **Hasil Pengukuran dan Analisis Capaian Kinerja**

Berdasarkan hasil pengukuran Kinerja sasaran strategis dalam Perubahan Perjanjian Kinerja Kecamatan tahun 2021, capaian kinerja pada tahun 2021 sebagai berikut:

SASARAN 1: "Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Manguharjo "

Tabel 3.2

Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Manguharjo

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA TH. 2021	REALISASI TH. 2021	CAPAIAN (%)	PREDIKSI
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Manguharjo	Nilai hasil Evaluasi Implementasi Sakip	80,01	80,01	100%	Sangat baik
Jumlah Capaian Rata-rata					100%	Sangat baik

Pencapaian sasaran "Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Manguharjo" tersebut diatas didukung oleh 1 program diantaranya yaitu :

1. Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini merupakan pendukung pelayanan terhadap masyarakat di kecamatan Manguharjo. Dalam pencapaian tujuan dalam pelayanan yang baik (Good governance.) perlu didukung dengan perencanaan, penganggaran, evaluasi, pelaporan dan pertanggung jawaban terhadap kinerja yang dilakukan oleh pegawai yang ada di lingkungan kecamatan Manguharjo sesuai tugas, pokok dan fungsi masing- masing sesuai peraturan yang berlaku.

SASARAN 2 "Meningkatnya tata kelola pemerintah kecamatan dan pembinaan pemerintahan kelurahan"

Tabel 3.3

Capaian Kinerja Sasaran Meningkatkan tata kelola pemerintah kecamatan dan pembinaan pemerintahan kelurahan.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA TH. 2021	REALISASI TH. 2021	CAPAIAN (%)	PREDIKAT
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya tata kelola pemerintah kecamatan dan pembinaan pemerintahan kelurahan	Prosentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan sosial, pembangunan dan ketentraman dan ketertiban masyarakat	100%	100%	100%	Sangat baik
Jumlah Capaian Rata-rata					100%	Sangat baik

Pencapaian sasaran "Meningkatnya tata kelola pemerintah kecamatan dan pembinaan pemerintahan kelurahan" tersebut diatas didukung oleh 1 program diantaranya yaitu :

1) Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

Program ini merupakan pendukung pelayanan terhadap masyarakat dikelurahan dan kecamatan Manguharjo, meliputi layanan surat menyurat/rekomendasi, sarana prasarana di kantor Kelurahan dan Koordinator layananan dibidang pelayanan umum yang ada di wilayah Kecamatan Manguharjo.

Kecamatan sebagai salah satu SKPD di Pemerintah Kota Madiun yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Pada tahun 2021 Pelayanan Kecamatan Manguharjo mempunyai target standar pelayanan Kecamatan harus sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan. Jumlah rekomendasi yang telah diselesaikan terdiri dari :

Tabel 3.4
Jenis Rekomendasi
Di Kecamatan Manguharjo Tahun 2021

No	Jenis Rekomendasi	Jumlah Rekomendasi
1	2	3
1	Tanda Daftar Usaha	43
2	Surat Keterangan Andalalin	5

3	Surat Keterangan Penutupan Jalan	4
4	Surat Keterangan Permohonan Beasiswa	128
5	Surat Keterangan Bantuan Usaha Mikro	43
6	Surat Keterangan Tunjangan Keluarga	25
7	Kelahiran	2
8	Kematian	34
9	SKCK	294
10	Surat Keterangan Belum Menikah	26
11	SKTM	87
12	IMB	-
13	Ijin Keramaian	-
Jumlah		691

Dari tabel 3.4 dapat dilihat Sasaran Kecamatan dengan indikator Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di kecamatan dapat tercapai sebesar 100%. Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa indicator ini sudah berhasil memenuhi target yang ditetapkan, dengan nilai capaian kinerja sebesar 100%.

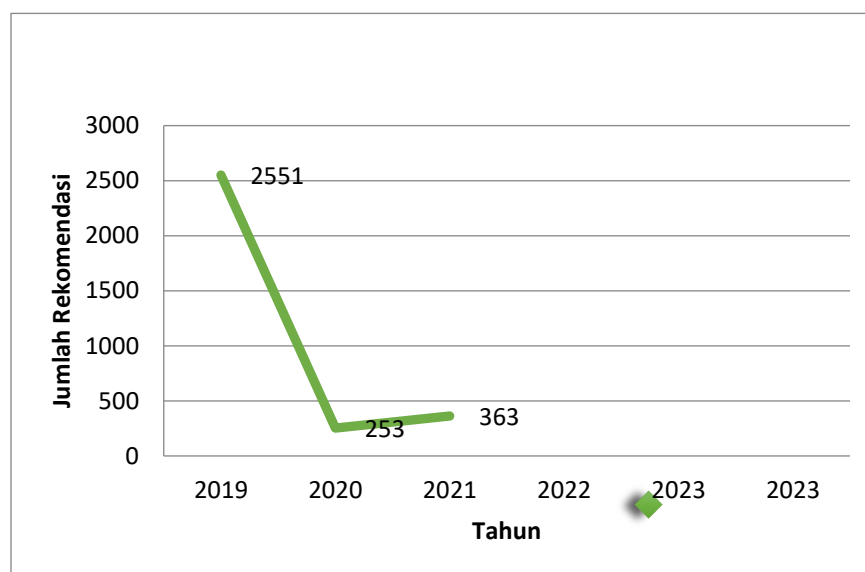
Selain memberikan pelayanan kepada masyarakat kecamatan juga mempunyai tugas memfasilitasi kegiatan-kegiatan OPD yang ada di Pemerintah Kota Madiun yang mempunyai sasaran kegiatan ada di Kecamatan Manguharjo. Pada tahun 2021 fasilitasi yang dilakukan oleh kecamatan manguharjo terdiri dari bidang pemerintahan, kesehatan, kebudayaan, pendidikan, pemberdayaan perempuan dan anak, keamanan dan ketertiban dan pemantauan pembangunan dan pemeliharaan fasilitas umum sebanyak 463 fasilitasi yang telah dilaksanakan. Adapun data laporan yang difasilitasi kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.5**Fasilitasi Yang Ditangani Kecamatan Manguharjo tahun 2021**

No	Fasilitasi	Jumlah fasilitasi
1	2	3
1	Permohonan Waris	363 permohonan
2	Pelaksanaan Lelang Bengkulu	7 kelurahan
3	Koordinasi pemungutan PBB	9 kelurahan
4	Monitoring pelaksanaan Raskinda	-
5	Monitoring pelaksanaan/penyaluran BPNT	-
6	Fasilitasi lomba UKS	-
7	Fasilitasi penilaian lomba kelurahan bebas jentik	-
8	Fasilitasi penilaian lomba KRPL	-
9	Fasilitasi operasi pasar beras mitra bulog	1 kali
10	Laporan NCTR	12 laporan
11	Laporan PSN	12 laporan
12	Laporan jamkesmasda	12 laporan
13	LaporanTKI	12 laporan
14	Laporan Jumanter	12 laporan
15	Senam bersama 3 pilar	6 kali
16	Sosialisasi keamanan dan ketertiban umum	5 kali
17	Laporan swadaya murni	12 laporan
Jumlah fasilitasi		463

Perkembangan Capaian Kinerja untuk Sasaran Meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan masyarakat secara umum menunjukkan gambaran yang cenderung meningkat pada kurun waktu 2019-2024, namun permohonan dari masyarakat dari tahun ketahun menurun dikarenakan adanya kebijakan untuk pelayanan pindah, datang, KTP dan KK langsung ditangani oleh Dukcapil tanpa melalui rekomendasi dari Kecamatan. Jumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti kecamatan manguharjo dapat dilihat pada grafik 3.6. Untuk target jangka menengah pada tahun 2021 diharapkan pelayanan dapat diselesaikan sesuai target dan kecamatan manguharjo mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku.

Grafik 3.6 Perkembangan Jumlah Rekomendasi dan Keterangan Waris Kecamatan Manguharjo



Permasalahan dan solusi

Upaya untuk meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat harus terus menerus ditingkatkan. Peningkatan ini baik itu dari segi sarana prasarana kantor untuk pelayanan, peningkatan kapasitas aparatur dengan menambah kualitas dan kuantitas SDM aparatur yang ada dipelayanan, perlu adanya system administrasi yang akurat sehingga data pelayanan mudah dicari dan diinformasikan. Selain itu juga perlu juga

dimunculkan inovasi-inovasi mengikuti perkembangan jaman yang semakin maju. Dengan begitu pelayanan prima kepada masyarakat secara tepat, cepat dan akurat dapat tercapai.

SASARAN 3 ” Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dan Pemangku Kepentingan Kecamatan Manguharjo”

Tabel 3.7

Capaian Kinerja Sasaran Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dan Pemangku Kepentingan Kecamatan Manguharjo

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA TH. 2020	REALISASI TH. 2020	CAPAI AN (%)	PREDIK AT
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dan Pemangku Kepentingan Kecamatan Manguharjo	Prosentase Kelurahan Yang Mendapatkan Klasifikasi Swasembada di Kecamatan Manguharjo	22%	44%	200%	Sangat baik
Jumlah Capaian Rata-rata					100%	Sangat baik

Pencapaian sasaran ” Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dan Pemangku Kepentingan Kecamatan Manguharjo” tersebut diatas didukung oleh 3 program diantaranya yaitu :

- 1) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan.
- 2) Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum.
- 3) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.

➤ Di program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan merupakan Pemberdayaan masyarakat dalam berpartisipasi untuk pembangunan yang merupakan sasaran dalam rangka mencapai tujuan

dalam Mendorong dan Meningkatkan partisipasi seluruh pemangku kepentingan untuk terlibat dalam pembangunan di kelurahan.



Sasaran tersebut diukur dengan beberapa indikator kinerja yaitu: Proses perencanaan pembangunan kota madiun berawal dari pelaksanaan Musyawarah perencanaan pembangunan yang dilaksanakan di tingkat RT/RW, tingkat kelurahan, tingkat kecamatan dan tingkat kota. Dari kegiatan musrenbang tersebut akan diperoleh usulan-usulan pembangunan dari masyarakat. Sehingga untuk proses perencanaan tersebut sangat diperlukan dukungan dan partisipasi dari warga masyarakat.

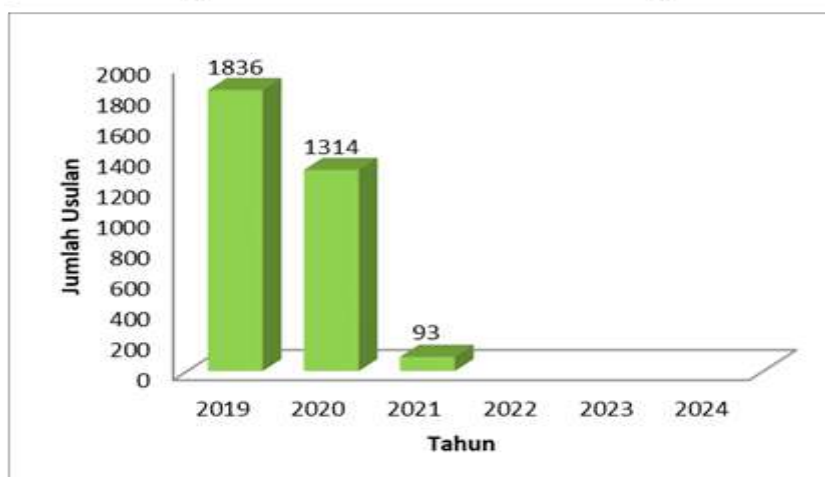




Indikator Prosentase usulan masyarakat yang terakomodir dalam Musrenbang Kota digunakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan. Kegiatan musrenbang yang dilaksanakan di 9 kelurahan dan kecamatan. Jumlah peserta musrenbang kelurahan dan kecamatan yang terdiri dari RT, RW, LPMK, PKK, Linmas serta tokoh masyarakat. Pada tahun 2021 ditargetkan jumlah usulan prioritas musrenbang 9 kelurahan sebanyak 178 usulan terdiri dari usulan Fisik sebanyak 94 Usulan dan non fisik sebanyak 84 usulan, dari usulan prioritas musrenbang di 9 kelurahan yang dijadikan usulan prioritas di kecamatan dan terakomodir dalam Musrenbang kota sebanyak 93 usulan terdiri dari usulan fisik sebanyak 48 usulan dan non fisik sebanyak 45 usulan. Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa indikator ini sudah berhasil memenuhi target yang ditetapkan, dengan nilai capaian kinerja sebesar 100%.

Perkembangan Peningkatan pemberdayaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan dapat dilihat selama kurun waktu tahun 2019-2024 terlihat pada grafik 3.6

Grafik 3.3
Perkembangan Jumlah Usulan Masyarakat Kecamatan
Yang Terakomodir Dalam Musrenbang Kota



Sasaran ini mempunyai indikator prosentase usulan masyarakat yang terakomodir dalam Musrenbang Kota, dimana jumlah usulan dari masyarakat yang masuk di kecamatan melalui aplikasi SIPP kurun waktu 2019-2024 sudah merupakan usulan prioritas 9 kelurahan yang semuanya bisa terakomodir pada usulan musrenbang kota nantinya. Sasaran tersebut secara umum menunjukkan gambaran yang cenderung berhasil mencapai target, dimana usulan yang masuk semuanya bisa terakomodir dalam bahan musrenbang kota sebesar 100%.

Permasalahan dan Solusi :

Kendala yang dihadapi dalam mengolah data usulan perencanaan dari warga masyarakat belum dapat disajikan secara berkelanjutan. Kota Madiun sudah mempunyai Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan (SIPP) namun system tersebut belum dapat menyajikan data yang berkelanjutan dari tahun ke tahun. SIPP hanya bisa menyajikan data pada tahun yang berlaku saja untuk data tahun sebelumnya SIPP belum bisa menyajikan, akhirnya usulan-usulan masyarakat berulang-ulang diusulkan sehingga data menjadi rancu. Untuk itu perlu adanya perbaikan untuk system SIPP yang ada sekarang ini.

Permasalahan umum dalam pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses yang ditentukan oleh kemauan dan kepedulian sosial dari warga

masyarakat. Di era saat ini semangat kepedulian dari warga masyarakat semakin menurun sebagai akibat dari berkembangnya semangat materialistis dan individualis. Solusi yang diambil yaitu dengan menumbuhkan kembali semangat gotong royong dan kepedulian sosial, termasuk meningkatkan interaksi sosial diantara sesama warga masyarakat, melalui program-program kegiatan pemberdayaan masyarakat, seperti BBGRM, kegiatan lomba-lomba di kelurahan, kegiatan pembangunan yang bersifat padat karya dan lain-lain.

➤ Di program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum merupakan fasilitasi koordinasi antar masyarakat dan instansi vertikal bersama tiga pilar yang merupakan sasaran dalam rangka mencapai tujuan dalam Mendorong dan Meningkatkan partisipasi seluruh pemangku kepentingan untuk terlibat dalam ketentraman dan ketertiban umum serta terwujudnya Harmonisasi Hubungan tokoh agama dan tokoh masyarakat di wilayah kelurahan se Kecamatan Manguharjo, melalui :

1. Senam bersama tiga pilar dan instansi Vertikal



2. Sosialisasi PPKM dalam rangka pencegahan Covid 19



3. Rapat koordinasi Keamanan dan Ketertiban Umum



4. Sholat isya berjamaah



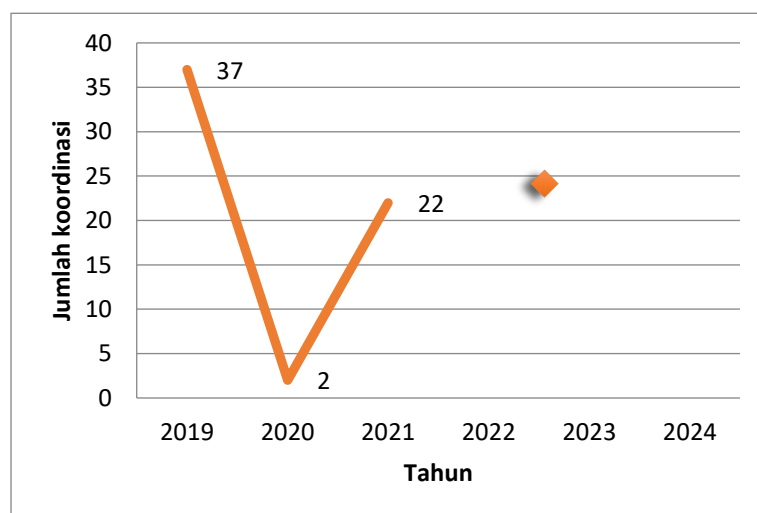
Dalam Meningkatkan dan menjaga keamanan dan ketertiban umum sangat penting dilakukan oleh semua warga masyarakat. Untuk itu sangat diperlukan Kegiatan koordinasi peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat dan harmonisasi hubungan tokoh agama dan tokoh masyarakat yang dilaksanakan bersama-sama dengan dengan Muspika, kelurahan serta tokoh masyarakat yang ada di 9 kelurahan seperti kegiatan sosialisasi tentang keamanan dan ketertiban, kerja bakti, apel , keagamaan dan olahraga bersama 3 pilar dan instansi Vertikal .

Dengan adanya kegiatan ini diharapkan konflik masyarakat yang terjadi dapat ditekan dan ditangani dengan baik, koordinasi dapat dilaksanakan dengan baik serta keamanan dan ketertiban dapat tercipta. Jumlah koordinasi keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan yang telah dilaksanakan kecamatan manguharjo selama tahun 2021 sebanyak melalui kegiatan rakor, olah raga, kerja bhakti sebanyak 14 kali dan kegiatan keagamaan sebanyak 8 kali. Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa indikator ini sudah berhasil memenuhi target yang ditetapkan, dengan nilai capaian kinerja sebesar 100%.



Perkembangan Peningkatan pemberdayaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan kenyamanan, ketertiban dan keamanan serta perlindungan masyarakat dapat dilihat selama kurun waktu tahun 2019-2024 pada grafik di bawah ini.

Grafik 3.8 Jumlah koordinasi keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan yang terfasilitasi



Seperti terlihat pada grafik 3.8 Sasaran ini mengalami kenaikan realisasi apabila dibandingkan dengan realisasi tahun-tahun sebelumnya. Dalam rangka meningkatkan keamanan dan ketertiban umum di wilayah

kecamatan manguharjo diperlukan suatu koordinasi baik itu dengan Muspika, Lurah, anggota linmas, tokoh masyarakat maupun tokoh agama. Kegiatan ini sangat diperlukan sebagai sarana komunikasi yang sangat efektif mengingat dengan adanya koordinasi tersebut dapat menekan dan menangani konflik yang terjadi di wilayah kecamatan manguharjo sebesar 100%. Dapat dilihat pada grafik 3.8 Jumlah koordinasi yang dilakukan oleh kecamatan selama kurun waktu tahun 2019-2024 banyak mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Kecamatan merupakan wilayah yang rawan konflik masyarakat. Dimana di wilayah kecamatan Manguharjo terdapat 2 padepokan perguruan pencak silat (setia hati terate berada di kelurahan nambangan kidul dan setia hati winongo di kelurahan winongo) yang sangat rawan bila keduanya bertemu. Namun Kesadaran masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban umum semakin meningkat dengan sering diadakannya koordinasi maupun sosialisasi tentang bagaimana menjaga keamanan dan ketertiban umum, diharapkan pada tahun 2021 keamanan dan ketertiban masyarakat dapat terwujud. Sasaran tersebut secara umum menunjukkan gambaran yang bahwa penanganan konflik lebih maeningkat, dengan keberhasilan dalam mencapai target yang ditetapkan.

- Di program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum merupakan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah melalui fasilitasi koordinasi antar masyarakat dan instansi vertikal bersama tiga pilar yang merupakan sasaran dalam rangka mencapai tujuan dalam Mendorong dan Meningkatkan partisipasi seluruh pemangku kepentingan untuk terlibat dalam pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional dan penanganan konflik serta tersedianya data pelaksanaan semua urusan pemerintah yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal di Kecamatan Manguharjo, melalui :

1. Rakor Pembinaan Wawasan Kebangsaan



2. Tersusunnya buku data profil dan monografi



Dengan adanya kegiatan ini diharapkan masyarakat sebagai warga negara Republik Indonesia lebih memahami tentang pentingnya berwawasan dan bernegara. Jumlah yang telah dilaksanakan yang telah dilaksanakan kecamatan manguharjo selama tahun 2021 sebanyak melalui kegiatan pembinaan dengan berbagai unsur sebanyak 2 kali dan kegiatan rakor konflik sebanyak 2 kali serta tersusunnya buku profil dan

monografi sebanyak 2 dokumen. Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa indikator ini sudah berhasil memenuhi target yang ditetapkan, dengan nilai capaian kinerja sebesar 100%.

B. REALISASI ANGGARAN

Laporan realisasi anggaran SKPD Kecamatan Manguharjo menggambarkan perbandingan antara anggaran SKPD tahun anggaran 2021 dengan realisasinya yang meliputi pendapatan dan belanja.

Realisasi pendapatan tahun 2021 sebesar Rp 679.640.115,00 atau mencapai 110,87% dari anggaran SKPD yang ditetapkan dalam APD/Perubahan APBD tahun anggaran 2021 sebesar Rp 613.000.000,00.

Realisasi belanja SKPD Kecamatan Manguharjo tahun anggaran 2021 sebesar Rp 22.258.404.490,00 atau mencapai 92,25% dari anggaran SKPD Kecamatan Manguharjo yang ditetapkan dalam APBD/Perubahan APBD tahun anggaran 2021 sebesar Rp 24.129.112.605,00 Perbandingan laporan realisasi anggaran SKPD tahun anggaran 2021 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.9
Anggaran, Realisasi dan Capaian Penyerapan Anggaran
Kecamatan Manguharjo tahun 2021

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	
1	Pendapatan	613.000.000,00	679.640.115,00	110,87%
2	Belanja	24.129.112.605,00	22.258.404.490,00	92,25%

Pencapaian kinerja belanja di Kecamatan Manguharjo terdiri dari belanja Pegawai, belanja barang jasa dan belanja modal.. Belanja program dan kegiatan serta sub kegiatan yang tersedia dalam APBD tahun anggaran 2021 guna mendukung capaian target kinerja sasaran di Kecamatan Manguharjo terdiri dari 5 (lima) program dan 12 (dua belas) kegiatan dan 34 (tiga puluh empat) sub kegiatan.

Realisasi capaian kinerja serta capaian penyerapan anggaran program dan kegiatan tahun anggaran 2021 dari masing-masing kinerja sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel 3.10
Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran dan Anggaran
Kecamatan Manguharjo Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
1	2	8	9	10	11
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Manguharjo	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	11.379.379.567	10.244.016.547	90,02
2	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Kecamatan Dan Pembinaan Pemerintahan Kelurahan.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	7.396.857.097	6.851.120.812	92,62
3	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dan Pemangku Kepentingan Kecamatan Manguharjo	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	4.743.071.967	4.615.283.444	97,31
		Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	427.877.480	380.470.930	88,92
		Program Penyelenggaraan Urusan	181.926.494	167.512.757	92,08

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
1	2	8	9	10	11
		Pemerintahan Umum			
Jumlah			24.129.112.605	22.258.404.490	92,25%

SASARAN 1 ” Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Manguharjo ”

Pencapaian kinerja untuk sasaran ” Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Manguharjo ” Kecamatan Manguharjo Kota Madiun pada tahun 2021 didukung dengan 1 indikator kinerja. Untuk mencapai keberhasilan dari 1 indikator kinerja tersebut didukung dengan melaksanakan 1 program. Dari Indikator kinerja tersebut diatas diperoleh rata-rata capaian kinerjanya sebesar 100%.

Pelaksanaan 1 program telah dialokasikan dana APBD tahun 2021 sebesar Rp. 11.379.379.567,- sampai dengan akhir tahun anggaran 2021 telah terealisasi sebesar Rp. 10.244.016.547,- atau sebesar 90,02%. Dana tidak terserap sebesar Rp. 1.135.363.020,- karena adanya efisiensi anggaran dan pelaksanaan kegiatan tidak sesuai jadwal dikarenakan adanya pandemi covid 19.

SASARAN 2 ” Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Kecamatan Dan Pembinaan Pemerintahan Kelurahan.”

Pencapaian kinerja untuk sasaran ” Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Kecamatan Dan Pembinaan Pemerintahan Kelurahan” Kecamatan Manguharjo Kota Madiun pada tahun 2021 didukung dengan 1 indikator kinerja dengan capaian kinerjanya sebesar 100%.

Pelaksanaan 1 program telah dialokasikan dana APBD tahun 2021 sebesar Rp.7.396,857,097,- sampai dengan akhir tahun anggaran 2021 telah terealisasi sebesar Rp.6.851.120.812,- atau sebesar 92,62%. Dana tidak terserap sebesar Rp.545.736.285, karena adanya efisiensi anggaran dan

pelaksanaan kegiatan tidak sesuai jadwal dikarenakan adanya pandemi covid 19.

SASARAN 3 ” *Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dan Pemangku Kepentingan Kecamatan Manguharjo.*”

Pencapaian kinerja untuk sasaran ” *Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dan Pemangku Kepentingan Kecamatan Manguharjo*” Kecamatan Manguharjo Kota Madiun pada tahun 2021 didukung dengan 1 indikator kinerja dengan capaian kinerjanya sebesar 100%.

Pelaksanaan 3 program telah dialokasikan dana APBD tahun 2021 sebesar Rp.5.352.875.941,- sampai dengan akhir tahun anggaran 2021 telah terealisasi sebesar Rp.5.163.267.131,- atau sebesar 96,45%. Dana tidak terserap sebesar Rp.189.608.810,- karena adanya efisiensi anggaran.

Dari hasil analisa pengukuran kinerja Kecamatan Manguharjo Tahun 2021 dan hasil analisa Realisasi Anggaran Kecamatan Manguharjo Tahun 2021, maka dapat diukur efisiensi Kinerja Kecamatan Manguharjo untuk mengetahui Akuntabilitas atau tingkat efisien dalam pencapaian target kinerja, yaitu dengan rumus mengurangi antara hasil rata – rata capaian kinerja dengan prosentase Realisasi Anggaran, adapun hasilnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.11
Efisiensi Capaian Kinerja Kecamatan Manguharjo
Tahun 2021

NO	SASARAN	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA	SERAPAN ANGGARAN	EFESIENSI
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Manguharjo	100	90,02	9,98
2	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Kecamatan Dan Pembinaan Pemerintahan Kelurahan.	100	92,62	7,38
3	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dan Pemangku Kepentingan Kecamatan Manguharjo	100	96,45	3,55

Dari tabel dan perhitungan diatas dapat terlihat bahwa pada sasaran “ Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Manguharjo ” persentase rata-rata capaian kinerja lebih besar dari persentase penyerapan anggaran sehingga Kecamatan Manguharjo dalam melaksanakan kinerjanya berupaya untuk mengadakan penghematan biaya atau efisiensi . Untuk mencapai rata-rata target kinerja sebesar 100 % jumlah anggaran yang diperlukan hanya 90,02% sehingga pada tahun 2021 Kecamatan Manguharjo telah penghematan anggaran sebesar 9,98%.

Sasaran “ *Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Kecamatan Dan Pembinaan Pemerintahan Kelurahan.*” persentase rata-rata capaian kinerja lebih besar dari persentase penyerapan anggaran sehingga Kecamatan

Manguharjo dalam melaksanakan kinerjanya berupaya untuk mengadakan penghematan biaya atau efisiensi . Untuk mencapai rata-rata target kinerja sebesar 100% jumlah anggaran yang diperlukan hanya 92,62% sehingga pada tahun 2021 Kecamatan Manguharjo telah penghematan anggaran sebesar 7,38%.

Sasaran “ *Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dan Pemangku Kepentingan Kecamatan Manguharjo.*” persentase rata-rata capaian kinerja lebih besar dari persentase penyerapan anggaran sehingga Kecamatan Manguharjo dalam melaksanakan kinerjanya berupaya untuk mengadakan penghematan biaya atau efisiensi . Untuk mencapai rata-rata target kinerja sebesar 100% jumlah anggaran yang diperlukan hanya 96,45% sehingga pada tahun 2021 Kecamatan Manguharjo telah penghematan anggaran sebesar 3,55%.

Berdasarkan tabel dan uraian tersebut diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pada tahun 2021 dalam pelaksanaan program dan kegiatan di ketiga sasaran diatas sudah dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Kecamatan Manguharjo Kota Madiun disusun berdasarkan Penetapan Kinerja Tahun 2021 sebagai pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian sasaran dan tujuan Kecamatan Manguharjo, serta dalam rangka perwujudan good governance. Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan Kecamatan sebagai penjabaran dari tujuan dan strategi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan arah kebijakan dan program yang ditetapkan.

Penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan pada tahun 2021 merupakan tahun ke tiga dari Rencana Strategis Kecamatan Tahun 2019-2024. Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi seluruh komponen perangkat kecamatan dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan pada periode Renstra 5 tahun berikutnya. Sedangkan untuk target yang belum tercapai diperlukan antisipasi dan dukungan dari berbagai pihak.

Berdasarkan pengukuran kinerja yang dilakukan terhadap seluruh sasaran sebagaimana tertuang dalam Renstra Kecamatan Manguharjo tahun 2019-2024 diperoleh kesimpulan bahwa dari 3 indikator kinerja utama, diperoleh 3 indikator yg telah berpredikat baik. Namun demikian, masih adanya beberapa indicator kinerja yang capaiannya belum seperti yang diharapkan menunjukkan masih adanya kendala dan hambatan serta permasalahan yang perlu untuk lebih mendapatkan perhatian pada tahun berikutnya. Beberapa permasalahan dan solusinya diantaranya:

1. Adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang berdampak pada system perencanaan dan penganggaran.

2. Adanya Perubahan RPJMD Kota Madiun sesuai Perda Nomer 04 tanggal 01 Desember Tahun 2021, berdampak pada adanya perubahan pada sasaran Kinerja Kecamatan Manguharjo .
3. Adanya perubahan peraturan perundangan yang berdampak pada perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) serta Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan.
4. Perlu adanya peningkatan kuantitas dan kualitas kader-kader pembangunan atau partisipasi masyarakat baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan serta perlu adanya perbaikan aplikasi perencanaan (SIPP) yang dapat menampung dan menyajikan semua usulan masyarakat selama beberapa tahun (semacam bank data usulan) sehingga usulan masyarakat dapat berkesinambungan selama berapa tahun.

Langkah – langkah yang perlu diambil dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan di Kecamatan Manguharjo guna peningkatan kinerja Perangkat Kecamatan dan Kelurahan dalam upaya mencapai tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kecamatan Manguharjo antara lain :

1. Mengadakan penyesuaian terhadap semua dokumen perencanaan dengan berpedoman pada peraturan-peraturan yang baru.
2. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah dan memberikan saran kepada bappeda untuk memperbaiki aplikasi SIPP sehingga dapat menyajikan data usulan masyarakat semacam bank data usulan musrenbang secara berkesinambungan selama berapa tahun.

Laporan Kinerja Kecamatan tahun 2021 ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi berbagai pihak yang membutuhkan, upaya perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan pada masa yang akan datang, indikator kinerja yang berukur untuk memudahkan pengukuran capaian kinerja serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

**PENGUKURAN KINERJA KECAMATAN MANGUHARJO
KOTA MADIUN TAHUN 2021**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Manguharjo	Nilai hasil Evaluasi Implementasi Sakip	skor	80,01	80,01	100%
2	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Kecamatan dan Pembinaan Pemerintahan Kelurahan	Prosentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan sosial, pembangunan dan ketentraman dan ketertiban masyarakat	%	100	100	100%
3	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dan Pemangku Kepentingan Kecamatan Manguharjo	Prosentase Kelurahan Yang Mendapatkan Klasifikasi Swasembada di Kecamatan Manguharjo	%	22	44	200%

CAMAT MANGUHARJO



DANANG NOVIANTO

Pembina

NIP. 19830507 200112 1 002

**MATRIK RENSTRA PERUBAHAN
KECAMATAN MANGUHARJO
TAHUN 2021-2024**

Tujuan	Sasaran	Indikator or Sasaran	Kode		Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), Sub Kegiatan (Sub Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Lokasi
								2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
Terwujudnya pemerintahan kecamatan yang baik	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Manguharjo	Nilai hasil Evaluasi Implementasi Sakip	X	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah				A skor	11.379.379.567	A skor	11.536.794.226	A skor	12.352.851.052	A skor	12.937.816.056	A skor	13.552.029.307	Kecamatan Manguharjo	Kecamatan Manguharjo
			X	01		2.01	Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah			100%	59.784.000	100%	68.784.000	100%	72.223.200	100%	75.834.360	100%	79.626.078	Kecamatan Manguharjo

X X	01	2.01	0 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Perencanaan, Pengendalian Perangkat Daerah				20 Dokumen	59.784.000	20 Dokumen	68.784.000	20 Dokumen	72.223.200	20 Dokumen	75.834.360	20 Dokumen	79.626.078	Kecamatan Manguharjo	Kecamatan Manguharjo
X X	01	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan				100%	9.854.964.210	100%	9.508.666.943	100%	9.953.531.808	100%	10.451.208.399	100%	10.973.768.818	Kecamatan Manguharjo	Kecamatan Manguharjo
X X	01	2	0 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah				100%	9.852.964.210	100%	9.506.666.943	100%	9.951.431.808	100%	10.449.003.399	100%	10.971.453.568	Kecamatan Manguharjo	Kecamatan Manguharjo
X X	01	2	0 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan keuangan perangkat daerah				13 Dokumen	2.000.000	13 Dokumen	2.000.000	13 Dokumen	2.100.000	13 Dokumen	2.205.000	13 Dokumen	2.315.250	Kecamatan Manguharjo	Kecamatan Manguharjo
X X	01	2,1		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	prosentase Perjanjian Kinerja ASN yang Tercapai				100%	7.200.000	100%	7.200.000	100%	7.560.000	100%	7.938.000	100%	8.334.900	Kecamatan Manguharjo	Kecamatan Manguharjo
X X	01	2,1	1 0	Sosialisasi Peraturan perundang-undangan	Presentase peserta yang memahami				100%	7.200.000	100%	7.200.000	100%	7.560.000	100%	7.938.000	100%	8.334.900	Kecamatan Manguharjo	Kecamatan Manguharjo

X X	01	2,1		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi umum				100%	82.596.000	100%	128.715.000	100%	143.751.000	100%	143.751.000	100%	143.751.000	Kecamatan Manguharjo	Kecamatan Manguharjo
X X	01	2,1	09	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas				100%	82.596.000	100%	128.715.000	100%	143.751.000	100%	143.751.000	100%	143.751.000	Kecamatan Manguharjo	Kecamatan Manguharjo
X X	01	2,1		Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan barang milik daerah urusan pemerintah daerah				100%	-	100%	149.029.500	100%	400.000.000	100%	400.000.000	100%	400.000.000	Kecamatan Manguharjo	Kecamatan Manguharjo
X X	01	2,1	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	persentase pemenuhan kebutuhan kendaraan dinas perorangan/ jabatan				100%	-	100%	16.632.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	Kecamatan Manguharjo	Kecamatan Manguharjo
X X	01	2,1	09	Pengadaan Gedung kantor atau bangunan lainnya	Persentase gedung kantor yang representatif				100%	-	100%	125.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	Kecamatan Manguharjo	Kecamatan Manguharjo

X X	01	2,1	1 0	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	persentase pemenuhan sarana dan prasarana gedung kantor				100%	-	100%	7.397.500	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	Kecamatan Manguharjo	Kecamatan Manguharjo
X X	01	2,1		Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tercukupinya kebutuhan jasa urusan pemerintah daerah				100%	1.163.622.240	100%	1.470.773.880	100%	1.562.281.056	100%	1.640.395.109	100%	1.722.414.864	Kecamatan Manguharjo	Kecamatan Manguharjo
X X	01	2,1	0 3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	persentase pemenuhan jasa peralatan/perengkapan kantor yang representatif				100%	1.163.622.240	100%	1.470.773.880	100%	1.562.281.056	100%	1.640.395.109	100%	1.722.414.864	Kecamatan Manguharjo	Kecamatan Manguharjo
X X	01	2,1		Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tercukupinya barang milik daerah yang layak digunakan				100%	211.213.117	100%	203.624.903	100%	213.503.988	100%	218.689.188	100%	224.133.647	Kecamatan Manguharjo	Kecamatan Manguharjo
X X	01	2,1	0 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase kendaraan dinas perorangan/ jabatan yang layak digunakan				100%	54.153.950	100%	59.559.200	100%	64.500.000	100%	64.500.000	100%	64.500.000	Kecamatan Manguharjo	Kecamatan Manguharjo

		X X	01	2,1	0 9	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	persentase gedung kantor yang layak digunakan				100%	111.759.167	100%	98.765.703	100%	103.703.988	100%	108.889.188	100%	114.333.647	Kecamatan Manguharjo	Kecamatan Manguharjo
		X X	01	2,1	1 0	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	persentase sarana prasarana gedung kantor yang layak digunakan				100%	45.300.000	100%	45.300.000	100%	45.300.000	100%	45.300.000	100%	45.300.000	Kecamatan Manguharjo	Kecamatan Manguharjo
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan dan Pembinaan Pemerintahan Kelurahan	Prosentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan sosial, pembangunan dan ketenteraman dan ketertiban masyarakat	0 1	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan				92,00 skor	7.396.857.097	92,05 skor	7.189.758.228	92,10 skor	6.553.593.481	92,15 skor	6.881.273.156	92,15 skor	7.225.336.812	Kecamatan Manguharjo	Kecamatan Manguharjo
		0 1	02	2		Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase terselesaikannya rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan				100%	7.334.651.657	100%	7.127.552.788	100%	6.488.277.769	100%	6.812.691.658	100%	7.153.326.240	Kecamatan Manguharjo	Kecamatan Manguharjo

			01	02	2	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di Kelurahan				100%	7.334.651.657	100%	7.127.552.788	100%	6.488.277.769	100%	6.812.691.658	100%	7.153.326.240	Kecamatan Manguharjo	Kecamatan Manguharjo
							Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kelurahan Manguharjo	Prosentase terselesaikanya permohonan rekomendasi di kelurahan				100%	833.000.000	100%	944.241.927	100%	750.938.570	100%	788.485.499	100%	827.909.773	Kecamatan Manguharjo	Kecamatan Manguharjo
							Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kelurahan Sogaten	Prosentase terselesaikanya permohonan rekomendasi di kelurahan				100%	769.628.790	100%	737.064.585	100%	676.361.217	100%	710.179.278	100%	745.688.242	Kecamatan Manguharjo	Kecamatan Manguharjo
							Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kelurahan Patihan	Prosentase terselesaikanya permohonan rekomendasi di kelurahan				100%	691.568.850	100%	680.050.833	100%	631.740.417	100%	663.327.438	100%	696.493.810	Kecamatan Manguharjo	Kecamatan Manguharjo

										100%	701.615.180	100%	721.326.580	100%	600.900.237	100%	630.945.249	100%	662.492.511	Kecamatan Manguharjo	Kecamatan Manguharjo
										100%	815.602.775	100%	755.447.545	100%	761.351.724	100%	799.419.310	100%	839.390.276	Kecamatan Manguharjo	Kecamatan Manguharjo
										100%	806.877.144	100%	837.376.000	100%	729.558.375	100%	766.036.294	100%	804.338.108	Kecamatan Manguharjo	Kecamatan Manguharjo

					Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kelurahan Pangongangan	Prosentase terselesaikanya permohonan rekomendasi di kelurahan				100%	765.308.030	100%	720.672.579	100%	624.412.635	100%	655.633.267	100%	688.414.930	Kecamatan Manguharjo	Kecamatan Manguharjo
					Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kelurahan Nambangan Lor	Prosentase terselesaikanya permohonan rekomendasi di kelurahan				100%	1.132.411.350	100%	905.300.000	100%	919.726.689	100%	965.713.023	100%	1.013.998.675	Kecamatan Manguharjo	Kecamatan Manguharjo
					Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kelurahan Nambangan Kidul	Prosentase terselesaikanya permohonan rekomendasi di kelurahan				100%	818.639.538	100%	826.072.739	100%	793.287.905	100%	832.952.300	100%	874.599.915	Kecamatan Manguharjo	Kecamatan Manguharjo
01	02	2			Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	persentase hasil koordinasi sarpras pelayanan umum yang ditindaklanjuti				100%	62.205.440	100%	62.205.440	100%	65.315.712	100%	68.581.498	100%	72.010.572	Kecamatan Manguharjo	Kecamatan Manguharjo

		01	02	2	1	Koordinasi /Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Koordinasi/ Pertemuan			8 Kali	62.205.440	8 Kali	62.205.440	8 Kali	65.315.712	8 Kali	68.581.498	8 Kali	72.010.572	Kecamatan Manguharjo	Kecamatan Manguharjo
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dan Pemanfaatan Kepentingan Kecamatan Manguharjo	Prosentase Kelurahan Yang Mendapatkan Klasifikasi Swasembada di Kecamatan Manguharjo	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kewenangan yang dijalankan Kecamatan dan tidak dilaksanakan OPD lain			100%	181.926.494	100%	181.926.494	100%	191.022.819	100%	200.573.960	100%	210.602.658	Kecamatan Manguharjo	Kecamatan Manguharjo
		01	05	2		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala daerah	Persentase Himbauan Kepala daerah Yang ditindaklanjuti			100%	181.926.494	100%	181.926.494	100%	191.022.819	100%	200.573.960	100%	210.602.658	Kecamatan Manguharjo	Kecamatan Manguharjo

				01	05	2	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Sosialisasi				2 Kali	111.926.494	2 Kali	111.926.494	2 Kali	117.522.819	2 Kali	123.398.960	2 Kali	129.568.908	Kecamatan Manguharjo	Kecamatan Manguharjo
				01	05	2	05	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase konflik yang terselesaikan				100%	55.000.000	100%	55.000.000	100%	57.750.000	100%	60.637.500	100%	63.669.375	Kecamatan Manguharjo	Kecamatan Manguharjo
				01	05	2	07	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintah yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Buku Profil Kelurahan dan Monografi Kecamatan dan Kelurahan				2 dokumen	15.000.000	2 dokumen	15.000.000	2 dokumen	15.750.000	2 dokumen	16.537.500	2 dokumen	17.364.375	Kecamatan Manguharjo	Kecamatan Manguharjo

01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	persentase pengkoordinasian ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan			100%	427.877.480	100%	815.576.400	100%	1.079.290.212	100%	1.133.254.723	100%	1.189.917.459	Kecamatan Manguharjo	Kecamatan Manguharjo
01	04	2		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Prosentase Rekomendasi Hasil Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang ditindak lanjuti			100%	109.875.290	100%	324.385.300	100%	831.847.212	100%	873.439.573	100%	917.111.551	Kecamatan Manguharjo	Kecamatan Manguharjo
01	04	2	2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Koordinasi/ Pertemuan			12 Kali	109.875.290	12 Kali	324.385.300	12 Kali	831.847.212	12 Kali	873.439.573	12 Kali	917.111.551	Kecamatan Manguharjo	Kecamatan Manguharjo
01	04	2		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada	Prosentase Hasil koordinasi yang ditindaklanjuti			100%	318.002.190	100%	491.191.100	100%	247.443.000	100%	259.815.150	100%	272.805.908	Kecamatan Manguharjo	Kecamatan Manguharjo

				01	04	2	1	Koordinasi/ Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Koordinasi/ Pertemuan				14 Kali	318.002.190	14 Kali	491.191.100	14 Kali	247.443.000	14 Kali	259.815.150	14 Kali	272.805.908	Kecamatan Manguharjo	Kecamatan Manguharjo
				01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah usulan prioritas Musrenbang kecamatan yang terakomodir dalam RKPD				18 usulan	4.743.071.967	18 usulan	2.644.100.425	18 usulan	3.433.080.378	18 usulan	3.447.234.397	18 usulan	3.462.096.117	Kecamatan Manguharjo	Kecamatan Manguharjo
				01	03	2		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat				100%	4.743.071.967	100%	2.644.100.425	100%	3.433.080.378	100%	3.447.234.397	100%	3.462.096.117	Kecamatan Manguharjo	Kecamatan Manguharjo

01	03	2	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Prosentase usulan musrenbang Manguharjo yang diprioritaskan dalam musrenbang kota			11%	318.891.760	12%	282.113.460	13%	283.080.378	14%	297.234.397	14%	312.096.117	Kecamatan Manguharjo	Kecamatan Manguharjo
01	03	2	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terpenuhi			27 paket	4.424.180.207	27 paket	1.125.599.410	27 paket	1.800.000.000	27 paket	1.800.000.000	27 paket	1.800.000.000	Kecamatan Manguharjo	Kecamatan Manguharjo
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Manguharjo	Jumlah sarana dan Prasarana yang terpenuhi			3 paket	650.000.000	3 paket	67.539.500	3 paket	200.000.000	3 paket	200.000.000	3 paket	200.000.000	Kecamatan Manguharjo	Kecamatan Manguharjo
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sogaten	Jumlah sarana dan Prasarana yang terpenuhi			3 paket	594.680.207	3 paket	322.785.800	3 paket	200.000.000	3 paket	200.000.000	3 paket	200.000.000	Kecamatan Manguharjo	Kecamatan Manguharjo
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Patihan	Jumlah sarana dan Prasarana yang terpenuhi			3 paket	420.000.000	3 paket	129.000.000	3 paket	200.000.000	3 paket	200.000.000	3 paket	200.000.000	Kecamatan Manguharjo	Kecamatan Manguharjo

									3 paket	371.800.000	3 paket	48.850.000	3 paket	200.000.000	3 paket	200.000.000	3 paket	200.000.000	Kecamatan Manguharjo	Kecamatan Manguharjo
									3 paket	425.700.000	3 paket	48.106.905	3 paket	200.000.000	3 paket	200.000.000	3 paket	200.000.000	Kecamatan Manguharjo	Kecamatan Manguharjo
									3 paket	467.000.000	3 paket	106.120.000	3 paket	200.000.000	3 paket	200.000.000	3 paket	200.000.000	Kecamatan Manguharjo	Kecamatan Manguharjo
									3 paket	370.000.000	3 paket	51.939.800	3 paket	200.000.000	3 paket	200.000.000	3 paket	200.000.000	Kecamatan Manguharjo	Kecamatan Manguharjo
									3 paket	900.000.000	3 paket	253.920.000	3 paket	200.000.000	3 paket	200.000.000	3 paket	200.000.000	Kecamatan Manguharjo	Kecamatan Manguharjo
									3 paket	225.000.000	3 paket	97.337.405	3 paket	200.000.000	3 paket	200.000.000	3 paket	200.000.000	Kecamatan Manguharjo	Kecamatan Manguharjo

0	03	2	0	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Prosentase masyarakat yang mengikuti kegiatan pemberdayaan masyarakat			100%	-	100%	1.236.387.555	100%	1.350.000.000	100%	1.350.000.000	100%	1.350.000.000	Kecamatan Manguharjo	Kecamatan Manguharjo
				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Manguharjo	Prosentase Masyarakat Yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Pemberdayaan			40%	-	40%	100.000.000	40%	150.000.000	40%	150.000.000	40%	150.000.000	Kecamatan Manguharjo	Kecamatan Manguharjo
				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sogaten	Prosentase Masyarakat Yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Pemberdayaan			35%	-	35%	210.551.020	35%	150.000.000	35%	150.000.000	35%	150.000.000	Kecamatan Manguharjo	Kecamatan Manguharjo
				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Patihan	Prosentase Masyarakat Yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Pemberdayaan			30%	-	30%	141.000.000	30%	150.000.000	30%	150.000.000	30%	150.000.000	Kecamatan Manguharjo	Kecamatan Manguharjo
				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Ngegong	Prosentase Masyarakat Yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Pemberdayaan			30%	-	30%	168.347.550	30%	150.000.000	30%	150.000.000	30%	150.000.000	Kecamatan Manguharjo	Kecamatan Manguharjo

									40%	-	40%	115.267.785	40%	150.000.000	40%	150.000.000	40%	150.000.000	Kecamatan Manguharjo	Kecamatan Manguharjo
									40%	-	40%	141.100.000	40%	150.000.000	40%	150.000.000	40%	150.000.000	Kecamatan Manguharjo	Kecamatan Manguharjo
									35%	-	35%	128.112.200	35%	150.000.000	35%	150.000.000	35%	150.000.000	Kecamatan Manguharjo	Kecamatan Manguharjo
									30%	-	30%	57.009.000	30%	150.000.000	30%	150.000.000	30%	150.000.000	Kecamatan Manguharjo	Kecamatan Manguharjo
									45%	-	45%	175.000.000	45%	150.000.000	45%	150.000.000	45%	150.000.000	Kecamatan Manguharjo	Kecamatan Manguharjo

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ADDI TRI NARWAHYU, S.TP, M.Si**

Jabatan : Camat Manguharjo Kota Madiun

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd**

Jabatan : Walikota Madiun

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Madiun, Januari 2021

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd

ADDI TRI NARWAHYU, S.TP, M.Si

Pembina

NIP. 19790630 199802 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KECAMATAN MANGUHARJO KOTA MADIUN**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Kecamatan dan Pembinaan Pemerintahan Kelurahan	Prosentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan sosial, pembangunan dan ketentraman dan ketertiban masyarakat yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100%
2	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dan Pemangku Kepentingan Kecamatan Manguharjo	Prosentase Kelurahan Yang Mendapatkan Klasifikasi Swasembada di Kecamatan Manguharjo	22%

No	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	11.417.900.730,00	-
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	5.839.326.200,00	-
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	2.963.891.760,00	-
4.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	263.985.880,00	-
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	181.926.494,00	-
	Jumlah	20.667.031.064,00	

Madiun, Januari 2021
**CAMAT MANGUHARJO
KOTA MADIUN**

WALIKOTA MADIUN

Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd

ADDI TRI NARWAHYU, S.TP, M.Si
Pembina
NIP. 19790630 199802 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ADDI TRI NARWAHYU, S.TP, M.Si**

Jabatan : Camat Manguharjo Kota Madiun

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd**

Jabatan : Walikota Madiun

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Madiun, Oktober 2021

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd

ADDI TRI NARWAHYU, S.TP, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19790630 199802 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KECAMATAN MANGUHARJO KOTA MADIUN**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Manguharjo	Nilai hasil Evaluasi Implementasi Sakip	80,01(skor)
2	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Kecamatan dan Pembinaan Pemerintahan Kelurahan	Prosentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan sosial, pembangunan dan ketentraman dan ketertiban masyarakat	100%
3	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dan Pemangku Kepentingan Kecamatan Manguharjo	Prosentase Kelurahan Yang Mendapatkan Klasifikasi Swasembada di Kecamatan Manguharjo	22%

No	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	11.379.379.567,00	-
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	7.396.857.097,00	-
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	4.743.071.967,00	-
4.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	427.877.480,00	-
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	181.926.494,00	-

Jumlah

24.129.112.605,00

Madiun, Oktober 2021

**CAMAT MANGUHARJO
KOTA MADIUN**

WALIKOTA MADIUN

Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd

**ADDI TRI NARWAHYU, S.TP, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19790630 199802 1 001**

